

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator paling penting dalam menilai sejauh mana pembangunan suatu daerah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Bustamam et al., 2021). PDRB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu, sehingga peningkatan PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin kuat pula daya dukung ekonominya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada berbagai faktor yang memengaruhi peningkatan PDRB, seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, iklim investasi yang kondusif, serta strategi pengurangan kemiskinan (Yuliadi, 2020).

Di tengah era globalisasi dan persaingan antar daerah yang semakin ketat, setiap wilayah di Indonesia dituntut untuk dapat mengelola potensi yang dimilikinya secara optimal dan berkelanjutan (Hartika et al., 2024). Tidak cukup hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mampu menggali keunggulan lokal, memperkuat daya saing, serta menciptakan kebijakan yang pro-investasi dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan potensi yang baik akan

berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh dan merata, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah tertinggal atau terpencil (Derhaliuk, 2022).

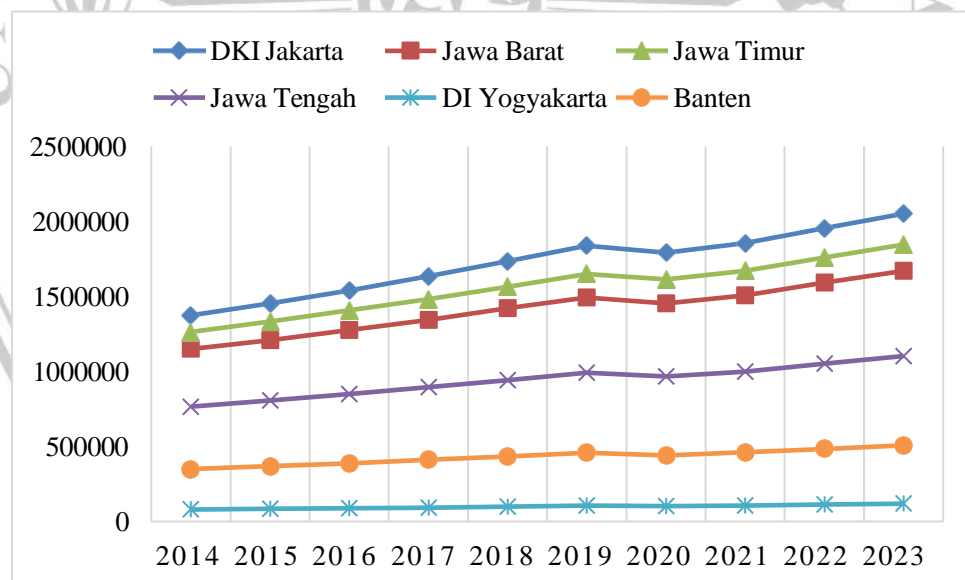
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa mencerminkan posisi strategis wilayah ini sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional. Secara statistik, Pulau Jawa menyumbang lebih dari 57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi wilayah ini sangat dominan dibandingkan pulau-pulau lainnya. Tingginya nilai PDRB di Pulau Jawa mencerminkan skala besar aktivitas produksi, jasa, dan distribusi yang berlangsung di wilayah ini, serta keberadaan pusat-pusat industri dan perdagangan utama Indonesia (Kusuma & Wahyudi, 2022).

Selain itu, Pulau Jawa merupakan tempat tinggal bagi sekitar 55% dari total populasi Indonesia, yang berdampak langsung terhadap tingginya aktivitas konsumsi dan produksi domestik (Rusli & Indriana, 2009). Kondisi ini menjadikan PDRB Pulau Jawa tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga kompleks secara struktural, mencerminkan keragaman sektor ekonomi yang berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, dinamika PDRB di Pulau Jawa sangat berpengaruh terhadap arah dan kestabilan ekonomi nasional.

Secara struktural, Pulau Jawa memiliki komposisi ekonomi yang sangat beragam. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat dikenal sebagai pusat industri dan jasa, Jawa Timur dan Jawa Tengah unggul dalam

sektor manufaktur dan pertanian, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta menonjol di sektor pendidikan dan pariwisata (Sadali & Musthofa, 2023; Solikin, 2022). Keberagaman ini menghadirkan spektrum luas dalam analisis ekonomi, memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana variabel seperti Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, tenaga kerja, dan kemiskinan saling berinteraksi dalam berbagai kondisi ekonomi. Di Bandingkan dengan pulau-pulau lain seperti Kalimantan atau Papua yang cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih spesifik misalnya berbasis sumber daya alam Pulau Jawa memberikan ruang analisis yang lebih komprehensif karena mencakup seluruh jenis aktivitas ekonomi utama (Ayuningtyas et al., 2023).

**Gambar 1 1 PDRB Pulau Jawa (2014-2023)**



Sumber: BPS Pulau Jawa, diolah

Gambar 1.1 menampilkan tren Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Grafik menunjukkan perkembangan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2014 hingga 2023. Secara umum, seluruh provinsi mengalami tren peningkatan PDRB dari tahun ke tahun, meskipun terlihat adanya perlambatan atau sedikit penurunan di sekitar tahun 2020, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi.

DKI Jakarta secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam nilai PDRB, mencerminkan dominasinya sebagai pusat kegiatan ekonomi, bisnis, dan pemerintahan nasional. Peningkatan PDRB Jakarta cukup signifikan setiap tahunnya, bahkan tetap tinggi meskipun sempat sedikit menurun di masa pandemi. Di posisi berikutnya terdapat Jawa Timur dan Jawa Barat, yang keduanya juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, meski selalu berada di bawah DKI Jakarta.

Jawa Tengah menempati peringkat keempat dengan tren pertumbuhan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Di bawahnya, Banten juga menunjukkan perkembangan yang positif, dengan peningkatan nilai PDRB yang stabil meskipun masih berada jauh di bawah provinsi-provinsi besar lainnya. Sementara itu, DI Yogyakarta mencatatkan nilai PDRB paling rendah sepanjang periode, namun tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang bertahap dan positif.

Di sisi lain, tantangan pembangunan di Pulau Jawa juga sangat kompleks, mulai dari urbanisasi ekstrem, kemacetan infrastruktur, ketimpangan antarwilayah (urban-rural), hingga kesenjangan sosial-

ekonomi (Ghufron & Bustomi, 2022). Kompleksitas ini memberikan dimensi yang lebih kaya dalam penelitian, karena dapat menggambarkan realitas pembangunan yang tidak linier dan penuh tantangan. Dengan begitu, penelitian ini akan berfokus pada PDRB di Pulau Jawa yang nantinya akan dipengaruhi oleh IPM, tenaga kerja, kemiskinan dan jumlah penduduk.

Meskipun Pulau Jawa telah banyak diteliti dalam konteks ekonomi regional karena kontribusinya yang besar terhadap PDB nasional, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada variabel tunggal atau terbatas, seperti pengaruh investasi atau infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana variabel-variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja, kemiskinan, dan jumlah penduduk secara partial dan simultan memengaruhi PDRB provinsi di Pulau Jawa. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Intania & Sari, 2023), meneliti PDRB di Pulau Jawa yang dipengaruhi oleh investasi, tenaga kerja, dan indeks pembangunan manusia di tahun 2016 hingga 2023.

Berdasarkan gap research di atas penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyajikan pendekatan multidimensional dalam menganalisis determinan PDRB di Pulau Jawa. Dengan menggabungkan empat variabel utama IPM, tenaga kerja, kemiskinan, dan jumlah penduduk pada periode 2014 hingga 2023. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh dan realistis tentang dinamika PDRB antar provinsi. Selain itu,

penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam memahami interaksi struktural ekonomi di wilayah dengan karakteristik ekonomi yang kompleks seperti Pulau Jawa, yang dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan kontekstual.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini maka, rumusan masalah yang terdapat pada penelitian adalah:

Bagaimana pengaruh dari faktor Indeks Pembangunan Manusia, tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap PDRB di Provinsi Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten)?

### **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih spesifik serta tidak meluas dari topic yang sedang diteliti. Batasan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian hanya berfokus pada Provinsi di Pulau Jawa tanpa meneliti provinsi lain di Indonesia.
2. Variabel pengaruh yang dipergunakan hanya pada Indeks Pembangunan Manusia, tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk tanpa menggabungkan faktor ekonomi, sosial maupun politik yang memungkinkan dapat berpengaruh.
3. Data yang dipergunakan terbatas selama mulai dari 2014 hingga 2023.

4. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan fokus melihat pengaruh dari faktor IPM, tenaga kerja, kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap PDRB di Pulau Jawa secara partial.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian, penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari faktor Indeks Pembangunan Manusia, tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap PDRB di Provinsi Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten).

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi Akademisi:

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu ekonomi regional dan perencanaan pembangunan wilayah. Dengan pendekatan komprehensif yang menggabungkan variabel makroekonomi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja, kemiskinan, dan jumlah penduduk studi ini memperluas pemahaman akademis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika PDRB secara simultan. Selain itu, fokus wilayah pada Pulau Jawa dengan struktur ekonomi yang kompleks dan keragaman karakteristik provinsi menawarkan ruang analisis yang kaya untuk pengujian teori-teori pembangunan yang relevan dalam konteks negara berkembang. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan

referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti dalam pengembangan model ekonomi regional yang lebih aplikatif dan kontekstual.

2. Manfaat bagi Pemerintah:

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini berpotensi memberikan arah kebijakan yang lebih strategis dan berbasis bukti bagi pemerintah daerah di Pulau Jawa. Dengan memetakan secara empiris pengaruh IPM, tenaga kerja, kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap PDRB antar provinsi, pemerintah dapat merancang intervensi kebijakan yang lebih terfokus dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Misalnya, daerah dengan kontribusi PDRB tinggi namun indeks kemiskinan yang masih signifikan dapat diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis produktivitas.

Di sisi lain, daerah dengan IPM rendah namun PDRB stabil dapat menjadi prioritas dalam hal peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang lebih sinkron antarwilayah, sekaligus sebagai dasar penguatan sinergi pembangunan nasional yang menjunjung asas keadilan dan efisiensi antardaerah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi akademis, tetapi juga relevansi tinggi dalam perumusan kebijakan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan.